

**PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PARIWISATA DAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT DI KABUPATEN BOYOLALI: PERSPEKTIF WELFARE STATE
TOURISM INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT AND COMMUNITY WELFARE IN
BOYOLALI REGENCY: A WELFARE STATE PERSPECTIVE**

Fikri Wahiddinsyah

Universitas Gadjah Mada

Daffa Fakhri Maulana

Universitas Negeri Yogyakarta

Yahya Yusron Naufal

Universitas Negeri Yogyakarta

ABSTRAK

Policy brief ini menganalisis kebijakan pembangunan infrastruktur pariwisata di Kabupaten Boyolali dalam perspektif *welfare state* dengan menyoroti hubungan antara aksesibilitas wisata dan kesejahteraan masyarakat. Kajian berfokus pada Cepogo Cheese Park, Wisata Edukasi Religi Qolbu, dan Waduk Cengklik sebagai representasi tata kelola swasta, pemerintah, dan kolaboratif. Hasil analisis menunjukkan bahwa peningkatan aksesibilitas dan fasilitas pendukung mendorong kenaikan kunjungan wisata serta aktivitas ekonomi lokal, termasuk UMKM, kuliner, homestay, dan sektor informal. Secara makro, tingkat kemiskinan menurun dari 9,63% pada 2024 menjadi 8,71% pada 2025 disertai perbaikan indikator kedalaman kemiskinan. Namun, pemerataan manfaat dan potensi konsentrasi keuntungan pada investor besar masih menjadi tantangan. Oleh karena itu, kebijakan pengembangan pariwisata perlu memperkuat regulasi kemitraan, partisipasi masyarakat, dan tata kelola berkelanjutan agar sejalan dengan prinsip keadilan sosial dan negara kesejahteraan.

Kata Kunci: infrastruktur pariwisata, aksesibilitas, kesejahteraan masyarakat, kebijakan publik, negara kesejahteraan.

ABSTRACT

This policy brief analyzes tourism infrastructure development policies in Boyolali Regency from a welfare state perspective, emphasizing the relationship between tourism accessibility and community welfare. The study focuses on Cepogo Cheese Park, Wisata Edukasi Religi Qolbu, and Waduk Cengklik, representing private, government, and collaborative governance models. The findings indicate that improved accessibility and supporting facilities have increased tourist arrivals and stimulated local economic activities, including MSMEs, culinary services, homestays, and the informal sector. At the macro level, the poverty rate declined from 9.63% in 2024 to 8.71% in 2025, accompanied by improvements in the poverty gap index. Nevertheless, ensuring equitable benefit distribution and preventing the concentration of gains among large investors remain challenges. Therefore, tourism development policies should strengthen partnership regulations, community participation, and sustainable governance in line with the principles of social justice and the welfare state.

Keywords: tourism infrastructure, accessibility, community welfare, public policy, welfare state.

A. Pendahuluan

Kabupaten Boyolali merupakan wilayah strategis di Provinsi Jawa Tengah dengan potensi besar dalam pengembangan pariwisata. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Boyolali (2025) dalam laporan “Statistik Daerah Kabupaten Boyolali 2025”, dijelaskan bahwa secara geografis, Boyolali berada di lereng Gunung Merapi dan Gunung Merbabu serta dilalui jalur Solo–Selo–Borobudur (SSB), yang memperkuat posisinya sebagai daerah tujuan wisata. Karakter topografi yang beragam menjadikan Boyolali memiliki daya tarik wisata alam, religi, dan edukasi yang potensial untuk dikembangkan secara berkelanjutan.

Laporan “Kabupaten Boyolali dalam Angka 2026” oleh BPS Kabupaten Boyolali (2026), menyebutkan bahwa pada tahun 2026 jumlah penduduk Boyolali mencapai 1.118.557 jiwa dengan kepadatan lebih dari 1.020 jiwa per km². Dinamika demografis ini menuntut penyediaan infrastruktur yang tidak hanya mendukung mobilitas wisatawan, tetapi juga menjamin pemerataan manfaat pembangunan bagi masyarakat lokal. *Welfare state* memandang bahwa proses pembangunan infrastruktur pariwisata harus dipahami sebagai instrumen kebijakan publik untuk memperluas akses ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan sosial, bukan semata-mata meningkatkan kunjungan dan pendapatan daerah (Midgley, 1999).

Policy brief ini memfokuskan analisis pada tiga destinasi utama, yaitu Cepogo Cheese Park, Wisata Edukasi Religi Qolbu, dan Waduk Cengklik. Ketiganya merepresentasikan model wisata dan tata kelola yang berbeda, swasta, pemerintah daerah, dan kolaboratif, yang berdampak pada orientasi investasi infrastruktur serta distribusi manfaat ekonomi. Merujuk pada laporan “Kabupaten Boyolali dalam Angka 2026” yang dirilis oleh BPS Kabupaten Boyolali (2026), pada tahun 2025, Wisata

Edukasi Religi Qolbu mencatat 201.800 pengunjung, disusul Cepogo Cheese Park 165.346 pengunjung, sementara Waduk Cengklik mengalami penurunan tipis menjadi 33.269 pengunjung. Perbedaan ini menunjukkan variasi aksesibilitas dan efektivitas pembangunan infrastruktur pada masing-masing destinasi.

Meskipun angka kemiskinan menurun dari 9,63% (2024) menjadi 8,71% (2025) (BPS, 2026), tantangan pemerataan kesejahteraan masih dihadapi. Penurunan secara agregat belum tentu mencerminkan distribusi manfaat yang adil antarwilayah dan kelompok masyarakat. Kesenjangan inilah yang menegaskan pentingnya meninjau pembangunan infrastruktur pariwisata dalam perspektif kesejahteraan sosial.

Walaupun pembangunan infrastruktur pariwisata di Kabupaten Boyolali menunjukkan capaian positif melalui peningkatan kunjungan wisatawan dan pertumbuhan aktivitas ekonomi lokal, orientasi kebijakan masih cenderung diukur berdasarkan indikator pertumbuhan ekonomi dan jumlah kunjungan. Hingga saat ini belum terdapat mekanisme yang secara eksplisit memastikan bahwa manfaat ekonomi yang dihasilkan sektor pariwisata terdistribusi secara merata kepada masyarakat lokal, terutama kelompok usaha kecil, pekerja informal, dan masyarakat di sekitar kawasan wisata. Kondisi tersebut menimbulkan *policy gap* antara tujuan pembangunan pariwisata yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dengan prinsip *welfare state* yang menekankan pemerataan manfaat pembangunan dan peningkatan kesejahteraan sosial secara inklusif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, *policy brief* ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pembangunan infrastruktur pariwisata di Kabupaten Boyolali, menilai tingkat aksesibilitas destinasi, serta mengevaluasi implikasinya terhadap kesejahteraan masyarakat lokal

guna merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

B. Kebijakan Pengembangan Pariwisata

Kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang dipilih pemerintah untuk mencapai tujuan yang berkaitan dengan kepentingan publik (Dye, 2013). Dalam pengembangan pariwisata, kebijakan ini bertujuan mengatur, memfasilitasi, dan mendorong pertumbuhan sektor pariwisata agar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. William N. Dunn (2018) menekankan bahwa kebijakan publik harus mampu memecahkan masalah secara sistematis, terukur, dan partisipatif. Sejak 2014, pemerintah Indonesia menjadikan pariwisata sebagai pilar pembangunan pasca kegagalan industrialisasi setelah krisis 1997, sehingga sektor ini diposisikan sebagai jalur strategis pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja (Rhama, 2022). Implementasinya diwujudkan melalui program prioritas seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan konektivitas, pengembangan desa wisata dan *homestay*, serta *digital tourism* pada periode 2014–2019 (Cahyadi & Newsome, 2021) yang mendorong lahirnya destinasi baru, peningkatan kunjungan wisatawan domestik, dan pertumbuhan ekonomi daerah. Landasan normatifnya tercantum dalam UU No. 10 Tahun 2009 Pasal 2 tentang Kepariwisataan yang menegaskan asas manfaat, kekeluargaan, keadilan, pemerataan, keseimbangan, kemandirian, kelestarian, partisipatif, berkelanjutan, dan demokratis sebagai dasar pembangunan pariwisata daerah.

Untuk mewujudkan *welfare state*, pembangunan infrastruktur pariwisata tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan jumlah wisatawan, tetapi juga memastikan bahwa manfaat ekonomi yang dihasilkan dapat diakses secara merata oleh masyarakat lokal (Esping-Andersen, 1990). Oleh karena itu, evaluasi kebijakan

pariwisata di Kabupaten Boyolali perlu mempertimbangkan tidak hanya aspek aksesibilitas destinasi, tetapi juga distribusi manfaat ekonomi, kesempatan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan wisata (Midgley, 1999; Suthanaya & Suwarsiningsih, 2022).

1. Kerangka Pengembangan Pariwisata di Indonesia

Secara nasional, pengembangan pariwisata diatur melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS). Kedua regulasi tersebut menegaskan bahwa pembangunan pariwisata tidak hanya bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kunjungan wisatawan, tetapi juga mendorong penciptaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, pemerataan pembangunan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan pariwisata perlu dinilai tidak hanya berdasarkan indikator ekonomi, tetapi juga berdasarkan sejauh mana manfaat pembangunan dapat diakses dan dirasakan oleh masyarakat lokal.

2. Kebijakan Pengembangan Pariwisata Kabupaten Boyolali

Kabupaten Boyolali merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dengan potensi pariwisata yang signifikan. Secara geografis, wilayah ini berada di lereng Gunung Merapi dan Gunung Merbabu pada ketinggian 75–1.500 meter di atas permukaan laut, yang memberikan keunggulan komparatif berupa lanskap alam yang indah, udara sejuk, dan panorama pegunungan (BPS Kab. Boyolali, 2023).

Pengembangan pariwisata di daerah ini diatur melalui Perda Kabupaten Boyolali No. 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Desa Wisata, yang

menjadi landasan yuridis pengembangan kawasan wisata berbasis komunitas. Regulasi tersebut mengatur asas dan prinsip penyelenggaraan desa wisata, pengembangan kawasan strategis, kelembagaan pengelolaan, serta peran serta

masyarakat. Berdasarkan data Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali (2023), terdapat lebih dari 40 objek wisata yang tersebar di 19 kecamatan dengan berbagai klasifikasi destinasi.

Jenis Wisata	Contoh Destinasi
Wisata Alam	New Selo, Jalur Pendakian Merbabu, Air Terjun Semuncar
Wisata Buatan	Waduk Cengklik, Waduk Kedungombo, Kebun Raya Indrokilo, Wisata Tlatar, Cepogo Cheese Park, Panorama
Wisata Budaya/ Sejarah	Kawasan Makam R. Ng Yosodipuro, Pemandian Tirtomarto, Museum Hamong Wardoyo
Wisata Religi	Masjid Agung Boyolali, Vihara Bodhi Kusuma, Wisata Edukasi Religi Qolbu

Untuk mencapai pengembangan wisata yang optimal, Cooper et al. (1994) menyatakan bahwa destinasi ideal harus memiliki empat komponen utama: atraksi (daya tarik), aksesibilitas (kemudahan akses), amenitas (fasilitas pendukung), dan *ancillary* (lembaga pendukung/pengelola). Kerangka ini dapat digunakan untuk menganalisis secara sistematis destinasi wisata di Kabupaten Boyolali guna menilai sejauh mana kebijakan yang diterapkan telah memenuhi standar pengembangan kawasan wisata yang ideal.

Dalam konteks tersebut, kebijakan pembangunan infrastruktur pariwisata yang selaras dengan prinsip *welfare state* perlu menekankan tiga aspek utama: (1) peningkatan aksesibilitas yang berkeadilan melalui pembangunan jalan, transportasi publik, dan fasilitas ramah disabilitas; (2) keterlibatan aktif masyarakat agar pertumbuhan pariwisata berdampak langsung pada peningkatan pendapatan, kesempatan kerja, dan kualitas hidup; serta (3) tata kelola kolaboratif dengan pendekatan *pentahelix* guna menjamin pemerataan manfaat dan keberlanjutan sosial-lingkungan. Dengan demikian, pengembangan pariwisata tidak hanya berfungsi sebagai penggerak ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen peningkatan

kesejahteraan masyarakat Boyolali secara komprehensif sesuai prinsip negara kesejahteraan.

C. Dampak Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Pariwisata Terhadap Aksesibilitas Wisata dan Kesejahteraan Warga

Kebijakan pembangunan infrastruktur pariwisata di Kabupaten Boyolali menunjukkan pergeseran orientasi dari sekadar pertumbuhan ekonomi menuju perluasan akses kesejahteraan. Perencanaan melalui RPJPD 2025–2045, RPJMD 2025–2029, dan RKPD yang terintegrasi dengan RTRW serta RIPPARKAB menetapkan tiga destinasi prioritas: Wisata Edukasi Religi Qolbu, Waduk Cengklik, dan Cepogo Cheese Park. Strategi ini sejalan dengan teori *Tourism Area Life Cycle* (TALC) dari Richard W. Butler (2025) yang menekankan pentingnya intervensi infrastruktur untuk menjaga daya saing dan mencegah stagnasi destinasi.

Di kawasan Cepogo, peningkatan jalan lingkaran, jalan provinsi, dan jalur antar-kecamatan memperbaiki aksesibilitas serta memangkas waktu tempuh dari Solo Raya dan Semarang. Pada 2025, jumlah pengunjung mencapai 165.346 orang (BPS, 2026). Infrastruktur ini juga memperlancar

distribusi susu peternak, menekan biaya transportasi, dan meningkatkan efisiensi ekonomi mikro. Indeks Kemahalan Konstruksi Boyolali 2024 sebesar 99,67 menunjukkan pembangunan relatif efisien dan mendukung investasi daerah (BPS Kabupaten Boyolali, 2024). Revitalisasi Wisata Edukasi Religi Qolbu di eks-Pasar Hewan Singkil meningkatkan aksesibilitas dan aktivitas ekonomi kawasan. Dengan dukungan jalan protokol, parkir, dan fasilitas pejalan kaki, destinasi ini mencatat 201.800 pengunjung pada 2025 (BPS, 2026), yang mendorong pertumbuhan kuliner, jasa perlengkapan ibadah, dan perdagangan souvenir serta memperkuat fungsi ruang publik yang inklusif.

Pengembangan Waduk Cengklik menggabungkan optimalisasi aset daerah dengan pendekatan *community-based tourism*. Perbaikan akses dan penerangan meningkatkan konektivitas kawasan yang dekat bandara dan tol. Pada 2025, kunjungan mencapai 33.269 orang (BPS, 2026). Meski lebih kecil, dampaknya terlihat pada tumbuhnya kafe, rumah makan, wisata air, serta sumber pendapatan alternatif bagi petani dan nelayan keramba. Secara makro, perkembangan sektor pariwisata berkontribusi terhadap peningkatan aktivitas ekonomi daerah yang berlangsung bersamaan dengan penurunan tingkat kemiskinan dari 9,63% (2024) menjadi 8,71% (2025). Namun demikian, penurunan kemiskinan tersebut tidak dapat sepenuhnya diatribusikan pada pembangunan infrastruktur pariwisata karena juga dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi dan sosial lainnya yang berlangsung pada periode yang sama.

Meskipun menunjukkan berbagai dampak positif, pembangunan infrastruktur pariwisata juga berpotensi menimbulkan sejumlah konsekuensi yang perlu diantisipasi. Peningkatan kunjungan wisata dapat memicu tekanan terhadap daya dukung lingkungan, terutama pada kawasan wisata alam dan perairan seperti Waduk Cengklik yang rentan terhadap peningkatan

volume sampah, pencemaran, serta perubahan fungsi lahan. Selain itu, pertumbuhan investasi dan aktivitas ekonomi di sekitar destinasi wisata berisiko meningkatkan nilai tanah dan harga properti yang dapat menyulitkan masyarakat lokal dalam mempertahankan kepemilikan lahannya. Ketimpangan manfaat ekonomi juga berpotensi muncul apabila peluang usaha dan investasi lebih banyak dinikmati oleh pelaku usaha berskala besar dibandingkan UMKM lokal. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur pariwisata memerlukan tata kelola yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan, perlindungan masyarakat lokal, dan pemerataan manfaat pembangunan.

Dalam perspektif *welfare state*, pembangunan infrastruktur pariwisata di Boyolali memiliki dimensi produktif dan redistributif karena memperluas akses ekonomi dan kesempatan kerja. Infrastruktur berfungsi sebagai instrumen distribusi manfaat, meski tantangan tetap ada agar keuntungan tidak terpusat pada investor besar. Konsistensi pemerintah daerah dalam menjaga pemerataan, partisipasi, dan inklusivitas menjadi kunci keberlanjutan kebijakan ini. Jika ditinjau melalui perspektif *welfare state*, keberhasilan pembangunan infrastruktur pariwisata tidak hanya ditentukan oleh peningkatan aktivitas ekonomi, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah daerah dalam memastikan distribusi manfaat yang adil kepada masyarakat. Dalam konteks Boyolali, pembangunan infrastruktur telah berhasil memperluas peluang ekonomi melalui pertumbuhan UMKM, jasa wisata, dan sektor pendukung lainnya. Namun demikian, belum terdapat instrumen kebijakan yang secara spesifik menjamin keterlibatan masyarakat lokal dalam rantai nilai pariwisata. Oleh karena itu, peran pemerintah daerah tidak cukup sebagai fasilitator investasi, tetapi juga sebagai aktor yang memastikan fungsi redistributif

pembangunan agar manfaat ekonomi tidak terkonsentrasi pada kelompok usaha besar atau investor eksternal.

D. Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan analisis terhadap kebijakan pengembangan kawasan wisata di Kabupaten Boyolali serta peran pemerintah daerah dalam implementasinya, bagian ini merumuskan rekomendasi kebijakan yang ditujukan untuk mengoptimalkan kontribusi sektor pariwisata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam perspektif *welfare state*. Rekomendasi ini

dikelompokkan ke dalam tiga kategori: penguatan regulasi dan kelembagaan, peningkatan kualitas implementasi, dan penguatan partisipasi masyarakat.

Untuk meningkatkan efektivitas implementasi, rekomendasi kebijakan perlu disusun berdasarkan skala prioritas dan horizon waktu pelaksanaan. Pendekatan ini penting agar pemerintah daerah dapat menyesuaikan kapasitas fiskal, kelembagaan, dan kewenangan yang dimiliki dalam pengembangan sektor pariwisata.

Prioritas	Rekomendasi Kebijakan	Horizon Waktu
Prioritas I	Penguatan konektivitas transportasi publik dan fasilitas UMKM lokal	Jangka Pendek (1–2 tahun)
Prioritas II	Regulasi kemitraan inti-plasma pariwisata	Jangka Menengah (3–5 tahun)
Prioritas III	Penguatan tata kelola ruang dan perlindungan lingkungan	Jangka Panjang (>5 tahun)

1. Penguatan Konektivitas Transportasi Publik

Pemerintah Kabupaten Boyolali perlu mengembangkan layanan transportasi wisata yang menghubungkan destinasi utama seperti Wisata Edukasi Religi Qolbu, Waduk Cengklik, dan Cepogo Cheese Park, sekaligus menyediakan ruang promosi bagi UMKM lokal di setiap titik wisata. Kebijakan ini relatif mudah diimplementasikan karena tidak memerlukan perubahan regulasi yang kompleks dan telah diterapkan di Kabupaten Banyuwangi melalui penguatan konektivitas antardestinasi yang terintegrasi dengan pemberdayaan ekonomi lokal. Langkah ini dapat memperluas akses wisatawan sekaligus meningkatkan peluang pemasaran produk masyarakat sekitar kawasan wisata.

2. Regulasi Kemitraan Inti-Plasma Pariwisata

Pemerintah Kabupaten Boyolali perlu menyusun regulasi yang mendorong kemitraan antara pengelola destinasi wisata

berskala besar dan pelaku usaha lokal melalui penyediaan ruang usaha, pelatihan, pendampingan, serta pemanfaatan produk lokal dalam rantai pasok pariwisata. Praktik serupa telah berkembang di berbagai desa wisata di Bali yang berhasil meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam aktivitas ekonomi pariwisata. Dengan demikian, manfaat pembangunan pariwisata tidak hanya dinikmati investor atau pengelola wisata, tetapi juga masyarakat lokal secara lebih merata.

3. Manajemen Tata Ruang dan Anti-Gentrifikasi

Pemerintah daerah perlu memperkuat pengendalian pemanfaatan ruang melalui integrasi kebijakan pariwisata dengan RTRW, RDTR, dan mekanisme perizinan investasi guna mencegah spekulasi lahan, gentrifikasi, serta kerusakan lingkungan di kawasan wisata. Praktik pengelolaan kawasan wisata di Jepang dan Korea Selatan menunjukkan bahwa pengaturan zonasi yang ketat mampu menjaga keseimbangan antara investasi, kepentingan masyarakat lokal, dan

keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, pengembangan pariwisata Boyolali perlu diarahkan pada prinsip pembangunan berkelanjutan agar manfaat ekonomi dapat berlangsung dalam jangka panjang.

4. Tata Kelola Lingkungan Berkelanjutan

Pemerintah Kabupaten Boyolali perlu mewajibkan setiap pembangunan fasilitas wisata baru didasarkan pada analisis daya dukung lingkungan dan sistem pengelolaan limbah yang memadai, khususnya pada kawasan yang rentan terhadap tekanan wisata seperti Waduk Cengklik dan Cepogo. Praktik pengelolaan ekowisata di Selandia Baru menunjukkan bahwa keberlanjutan destinasi sangat ditentukan oleh keseimbangan antara pengembangan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan kawasan. Oleh karena itu, pengembangan infrastruktur pariwisata di Boyolali perlu disertai mekanisme monitoring lingkungan yang partisipatif guna menjaga kualitas lingkungan dan keberlanjutan manfaat pariwisata dalam jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dunn, W. N. 2018. *Public Policy Analysis: An Integrated Approach (6th ed)*. Routledge.
- Dye, T. R. 2013. *Understanding Public Policy (14th edition)*. Pearson.
- Midgley, J. (1999). *Social Development: The Developmental Perspective in Social Welfare*. SAGE Publications Ltd, <https://doi.org/10.4135/9781446221839>.
- Espring-Andersen, G. 1990. *The Three Worlds of Welfare Capitalism*. Princeton University Press.

Jurnal

- Butler, R. 2025. Tourism Destination Development: The Tourism Area Life Cycle Model. *Tourism*

Geographies, 27(3–4), 599–607. <https://doi.org/10.1080/14616688.2024.2325932>.

- Cahyadi, H. S., & Newsome, D. 2021. “The Post COVID-19 Tourism Dilemma for Goeparks in Indonesia. *International Journal of Geoheritage and Parks*”. 9(1), 199-211. <https://doi.org/10.1016/j.ijgeop.2021.02.003>.

- Rhama, B. 2022. Local Communities' and Tourists' Adaptation to Pandemic-Induced Social Disruption: Comparing National Parks and Urban Destinations. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 84(1), 1-18. <https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2022.103380>.

- Suthanaya, P. A., & Suwarsiningsih, R. 2022. Infrastructure Development Strategy Based on The Accessibility to Tourism Location (Case Study Of Bali Province-Indonesia). *IOP Publishshing*, 1(1), 1-11.

Dokumen

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Boyolali. 2024. “Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Boyolali 2024”. *Laporan*.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Boyolali. 2025. “Statistik Daerah Kabupaten Boyolali 2025”. *Laporan*.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Boyolali. 2026. “Kabupaten Boyolali Dalam Angka 2026”. *Laporan*.

Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025. 2 Desember 2011. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125. Jakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata. 16 Januari 2009.

Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 11. Jakarta.

Website

Radio Republik Indonesia. *Boyolali Perkuat Ekosistem-Pariwisata Melalui Peluncuran Desa Wisata Terintegrasi-Cepogo*. 18 Desember 2025.

<https://berita.rri.co.id/surakarta/regional/2050816/boyolali-perkuat-ekosistem-pariwisata-melalui-peluncuran-desa-wisata-terintegrasi-cepogo>. Akses 27 Februari 2026.